

Partai politik islam era reformasi dan piagam jakarta dalam sidang tahunan mpr 2000

Lili Romli, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=96914&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini membahas tentang kebangkitan kembali partai politik Islam era reformasi kaitannya dengan perjuangan Piagam Jakarta. Pada era reformasi ini ternyata partai politik Islam yang lahir ternyata cukup banyak, 42 partai politik. Dari jumlah tersebut, yang ikut Pemilu 1999 hanya 17 partai politik. Banyaknya partai-partai politik Islam tersebut sudah barang tentu melahirkan fragmentasi. Fragmentasi juga terjadi penggunaan asas, di mana ada partai Islam yang menggunakan asas Islam, asas Pancasila, dan asas Islam dan Pancasila.

Ada empat faktor yang menyebabkan bangkitnya kembali partai politik Islam dalam era reformasi ini. Keempat faktor itu terdiri dari faktor teologis, faktor sosiologis, faktor historis, dan faktor momentum reformasi yang melahirkan kebebasan untuk tumbuh dan berkembangnya partai politik.

Secara ideologis, partai-partai politik Islam yang ada pada era reformasi ini terbagi atas tiga kelompok, yaitu kelompok tradisional, modernis, dan fundamentalis. Kelompok tradisional, antara lain, terdiri dari Partai Kebangkitan Umat (PKU) dan Partai Politik Panah Umat (PNU). Kelompok modernis, antara lain, terdiri dari Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Umat Islam (PUI), dan Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII). Sedangkan kelompok fundamentalis adalah Partai Keudulan.

Partai-partai politik Islam tersebut, ternyata dalam Sidang Tahunan MPR 2000, yang membahas Amendemen Kedua UUD 1945, berusaha memperjuangkan kembali Piagam Jakarta masuk dalam UUD 1945, khususnya Pasal 29. Namun, ternyata, yang memperjuangkan kembali Piagam Jakarta di MPR hanya dua partai politik Islam saja, yaitu PPP dan PBB. Sedangkan partai politik Islam lainnya yang ada di MPR tidak mendukung.

Selain itu, ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah serta tokoh-tokoh Islam juga tidak mendukung perjuangan PPP dan PBB tersebut. Bahkan mereka menentang. Dengan demikian, tantangan perjuangan PPP dan PBB bukan hanya dari kalangan Kristen dan Nasionalis sekuler, tetapi juga dari kalangan Islam sendiri.

Dengan adanya perjuangan PPP dan PBB untuk memperjuangkan kembali Piagam Jakarta masuk dalam UUD 1945, meskipun tidak mendapat dukungan yang kuat, menunjukkan bahwa persoalan hubungan agama dan negara di Indonesia belum selesai. Dengan demikian perlu kiranya dicari solusi yang tepat sehingga persoalan itu tidak selalu muncul setiap ada momentum perubahan terhadap konstitusi.